

Konflik Sosial Masyarakat Dalam Masa Pembebasan Lahan Pembangunan Bandar Udara Kediri: Studi Kasus Desa Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Safrial Fachry Pratama

AFILIASI

Program Studi Magister
Antropologi Universitas
Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta,
55281, Indonesia

Corresponding author:
safrialpratama@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan bandar udara pada dasarnya bertujuan meningkatkan konektivitas masyarakat lokal dengan dunia di luarnya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya kepada masyarakat luas. Namun demikian, di sisi lain pembangunan bandar udara juga mengakibatkan terjadinya pengambilan lahan (alih fungsi lahan) masyarakat yang akan dijadikan area bandar udara. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat memunculkan keresahan, perlawanan, dan bahkan konflik sosial dalam proses pembangunan bandar udara. Penelitian ini mencoba untuk memotret dan mendeskripsikan praktik-praktik sosial dan konflik sosial yang terjadi, sejak awal proses pembangunan hingga proses konstruksi bandar udara Kediri. Penelitian ini dilakukan di Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan fokus wilayah observasi di Dusun Bedrek Selatan. Kerangka berpikir yang digunakan untuk membaca fenomena konflik sosial akibat pembangunan bandara adalah bahwa setiap masyarakat akan mencoba menemukan cara-cara tertentu dalam menyelesaikan konflik sosial yang melanda masyarakat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, pengambilan dokumentasi berupa foto, serta analisis studi literatur dengan enam informan kunci dan dua informan tambahan yang masing-masing memiliki kaitan, kepentingan, aktor dari setiap konflik sosial yang terjadi akibat dari pembangunan bandar udara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan bandar udara, sejak tahap sosialisasi, proses pembebasan lahan, dan konstruksi bandar udara diwarnai dengan konflik sosial baik yang bersifat vertikal, horizontal, dan simbolik. Namun, dengan keterlibatan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka mampu menemukan resolusi, sehingga konflik sosial tidak membesar dan tidak berkepanjangan.

Keywords: Pembangunan bandar udara, konflik sosial, hubungan sosial

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua per tiga dari wilayahnya merupakan perairan. Indonesia juga terletak pada posisi lokasi yang strategis karena berada di persinggahan rute perdagangan dunia. Indonesia juga merupakan negara besar di dunia pada tahun 2025 yang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Ketika melihat sejumlah potensi tersebut banyak dari wilayah di negeri ini yang masih memerlukan perbaikan hingga penyempurnaan bukan hanya pada faktor fisik saja melainkan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera menjadi dambaan setiap warga negara yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, transformasi ekonomi merupakan salah satu strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sudah didambakan untuk memajukan Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan menjadi sarana untuk transformasi ekonomi tersebut yang terus dilakukan oleh pemerintah melalui ragam sektor dan lini untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut beragam mulai dari perbaikan hingga pembuatan infrastruktur baru yang nantinya juga menjadi penghubung wilayah satu dengan yang lain dan menjadi alternatif bagi daerah-daerah untuk bisa bertukar informasi, potensi, hingga keunggulan yang dimiliki baik secara alam dan sosial. Dengan pembangunan yang ada tersebut diharapkan menjadi jalan agar kesejahteraan masyarakat bisa merata dan terhindar dari bentuk-bentuk kesenjangan sosial.

Dalam laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia¹ disebutkan bahwa pembangunan konektivitas antardaerah menjadi prioritas utama di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. MP3EI atau biasa disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan langkah yang tepat untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju. Pembangunan konektivitas antardaerah menjadi prioritas utama di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama. Pertama, pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi; Kedua, memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional dan; Ketiga, Pengembangan Center of Excellence di setiap koridor ekonomi. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2012). Dari ketiga elemen utama tersebut, elemen kedua terkait upaya memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally connected) menjadi hal yang harus mendapatkan perhatian utama. Infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Untuk tujuan tersebut maka

¹ <https://setkab.go.id/transformasi-pembangunan-ekonomi-mp3ei-sebuah-estafet/> (Diakses pada Jumat, 3 Februari 2023).

Pemerintah Indonesia menetapkan Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait Pembangunan Bandar Udara Terpadu yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terpilihnya Kediri sebagai lokasi pembangunan bandara bertaraf internasional tidak lepas karena andil dari PT Gudang Garam Tbk. yang juga menjadi pemrakarsa sekaligus pelaksana pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri ini. Disebutkan adanya prakarsa dari PT Gudang Garam Tbk. Yang merupakan pihak swasta ini dirasa merupakan hal positif dalam upaya percepatan pembangunan di Indonesia serta adanya pembangunan tersebut disambut baik oleh pemerintah sehingga dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memudahkan semua proses dari pembangunan bandar udara ini hingga tahapan pembebasan lahan sekaligus.

Sejauh ini, penelitian mengenai pembangunan bandar udara di suatu wilayah masih ditekankan pada tiga tataran penting saja tanpa melihat implikasi sosial berupa konflik yang terjadi pada saat proses pembangunan bandara tersebut terjadi. Pertama, studi yang ada membahas mengenai keterkaitan antara pembangunan bandara dan tata guna lahan yang ada (Purwadi, 2012 ; Tampi, 2015 ; Wibawa, 2015 ; Kurniawan, 2017 ; Tjahjono dan Yuliawati, 2017 ; Rahayu dan Cahyono, 2021). Kedua, studi yang ada berkaitan antara pembangunan bandara dan arsitektur dari bandara tersebut (Cahya dkk., 2016 ; Hidayah, 2021 ; Ramadhan, 2021). Serta yang ketiga, pembangunan bandar udara selalu dikaitkan dengan strategi pengembangan infrastruktur di dalamnya (Resmawan, 2012 ; Adisasmita dkk., 2017 ; Fauzela dkk., 2019 ; Shobirin dan Ali, 2019 ; Nurhayati dkk., 2020). Dengan adanya kecenderungan pada tiga tataran tersebut terlihat bahwa studi mengenai keterkaitan antara pembangunan bandar udara dan konflik di tengah masyarakat belum diperbincangkan sehingga hal ini juga yang menjadi keterbaruan studi yang mengaitkan pembangunan bandar udara dan implikasi sosial pada masyarakat.

Melihat sebuah pembangunan sering hanya dilihat pada aspek fisik dan meninggalkan aspek non-fisik (sosiokultural) yang sebenarnya menjadi bentuk konkret dampak dari setiap pembangunan yang ada termasuk dalam pembangunan bandar udara di sebuah wilayah. Pembangunan bandar udara tidak lain juga fungsinya sebagai bentuk pemakmuran sebuah daerah yang otomatis juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di dalamnya. Selain itu, dibangunnya bandar udara juga menjadi bentuk keterhubungan antar wilayah satu dengan yang lain bukan hanya dalam bentuk penerbangan saja, lebih dari itu keterhubungan ini juga melampaui segala sektor dan lini. Tujuan pembangunan adalah untuk menghapuskan kemiskinan. Dengan adanya pembangunan diharapkan menjadi jalan pintas sekaligus peretas kemiskinan-kemiskinan yang ada, sehingga apabila tujuan tersebut sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap selanjutnya yakni menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup yang lebih sejahtera (Gant, 1971 dalam Sirojuzilam, 2016). Adapun tujuan inti dari suatu pembangunan (Todaro dan Smith, 2008) yaitu pertama meningkatkan persediaan dan perluasan distribusi berbagai macam kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan serta perlindungan keamanan, kedua meningkatkan standar hidup berupa peningkatan

pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan serta meningkatkan kesadaran atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, dan ketiga adalah memperluas jangkauan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan membebaskan mereka dari ketergantungan. Yang diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut mampu dijadikan sebagai peningkat situasi sosial dan ekonomi di suatu wilayah.

Suka ataupun tidak pembangunan bandar udara akan memaksa masyarakat terdampak proyek tersebut untuk berubah, baik dalam lingkungan fisik, sosial, bahkan kultural sekaligus dengan waktu yang cepat. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Az-Zahra dan Sigit (2019) bahwa pembangunan bandar udara di suatu wilayah merupakan bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja dengan beragam kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan bandar udara ini menysasar pada lima desa terdampak dengan ring satu terletak di Desa Grogol dan Desa Bulusari, ring dua di Desa Jatirejo dan Desa Tarokan serta pada ring tiga yakni di Desa Kalipang yang setiap desa tersebut memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang unik serta tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain namun sama-sama mendapatkan dampak dari adanya pembangunan bandar udara. Hal tersebut terlihat pada Desa Grogol yang wilayahnya menjadi ring satu pada pembangunan bandar udara ini yang secara otomatis bersinggungan langsung dengan adanya proyek ini, pemilihan Desa Grogol sebagai objek penelitian juga didasarkan pada aspek konflik sosial yang terjadi di sana dengan fokus penelitian di Dusun Bedrek Selatan. Merupakan sesuatu yang baru bahkan tidak bisa diduga sebelumnya oleh warga di sana ketika wilayahnya terkena pembangunan ini serta banyak sekali runtutan fenomena-fenomena sosial di dalamnya. Meski banyak yang berpikiran bahwa adanya proyek bandar udara akan menyejahterakan masyarakatnya, hal ini sepertinya menjadi koreksi kita bersama karena tidak selamanya adanya proyek pembangunan bandar udara akan memberikan dampak positif ada pula dampak negatif yang sebenarnya sangat berdekatan dengan masyarakat yang mungkin berubah yakni mengenai hubungan sosial yang timbul seiring adanya proses ganti untung, masuknya warga dari luar wilayah, hingga pembagian hak waris.

Menurut Lederach dalam Susan (2009) salah satu asumsi mengenai konflik sebagai sebuah konstruksi sosial yakni konflik sosial dipahami sebagai hal yang alamiah, suatu pengalaman-pengalaman umum yang hadir di setiap hubungan dan budaya yang melalui pendapat tersebut menjadi landasan penting bahwa konflik juga merupakan bentuk relasi dari hubungan dan kebudayaan yang kemudian secara alami menimbulkan konflik itu sendiri. Apabila dikaitkan pada masyarakat desa dan pembangunan bandar udara adanya konflik bisa dan otomatis muncul saat pembangunan tersebut terjadi dikarenakan adanya budaya-budaya yang berubah diiringi dengan hubungan-hubungan internal di dalamnya yang berubah yang merupakan implikasi dari konflik tersebut. Padahal dalam Durkheim (2010) disebutkan bahwa masyarakat desa digambarkan memiliki basis sosial yang kuat dengan ikatan-ikatan sosial dan solidaritas yang mapan. Namun, hal tersebut bisa terbantahkan begitu saja ketika sebuah proyek pembangunan bandar masuk ke dalam lini tersebut dan menimbulkan ragam konflik sosial. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan bandar udara yang akan menimbulkan adanya

konflik baru juga ketika pendatang yang merupakan pekerja di bandar udara juga turut membawa kebiasaan-kebiasaan dari kampung halamannya. Disebutkan oleh Prasisko (2018) bahwa proses migrasi orang-orang ke tempat tujuannya juga turut serta membawa kebudayaannya disertai dengan penyesuaian dengan masyarakat setempat.

Desa Grogol merupakan desa yang wilayahnya menjadi ring satu pada pembangunan bandar udara ini yang secara otomatis bersinggungan langsung dengan adanya proyek ini. Adanya persinggungan ini juga ternyata tidak begitu saja berjalan dengan lurus dan tepat, melainkan adanya persinggungan baik secara kewilayahan, sosial, hingga kultural ini akan menciptakan masalah-masalah sosial baru di daerah tersebut. Dengan adanya pembangunan bandar udara ini juga telah melahirkan bentuk adaptifitas masyarakat berupa tindakan penyesuaian dengan adanya penduduk baru yang datang sebagai pekerja di bandara, munculnya aksi-aksi demonstrasi di tengah proyek bandara ini, serta adanya kegiatan-kegiatan adat di Desa Grogol yang juga sementara dihentikan saat pembangunan bandar udara terjadi. Selain itu, pola-pola kehidupan masyarakat juga terganti dengan makin sedikitnya kegiatan *srawung*² warga dikarenakan banyak yang menghindari debu-debu yang bertebaran dari proyek ini serta tidak adanya kegiatan pos kamling yang juga dikarenakan adanya polusi suara di wilayah proyek bandar udara ini. Yang dengan demikian bukan tidak mungkin apabila muncul juga konflik sosial sebagai akibat dari adanya sebuah “pembangunan”.

Berangkat dari latar belakang tersebut, ada tiga poin yang mendasari pentingnya kajian mengenai konflik sosial sebagai dampak non fisik (kultural) dari adanya pembangunan bandar udara. Dengan adanya serangkaian proses pembangunan bandar udara yang diawali dengan sosialisasi mengenai pembangunan bandar udara pada masyarakat Desa Grogol, sejumlah peringatan mengenai pembangunan bandar udara yang dilakukan dengan mengelilingi kampung, adanya distribusi kompensasi dari penyelenggara pembangunan bandar udara, sejumlah proses pembebasan lahan yang disertai dengan ganti untung, serta adanya relokasi sejumlah lahan permukiman serta peternakan warga telah menimbulkan wajah baru bagi Desa Grogol yang diselingi oleh konflik sosial pada setiap rangkaian proses pembangunan bandar udara tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan dengan warga Desa Grogol khususnya Dusun Bedrek Selatan sebagai warga terdampak pembangunan bandara udara serta konflik social yang terjadi. Wawancara dilakukan pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap mematuhi kebijakan memakai masker dan menjaga jarak untuk meminimalisasi risiko yang terjadi pasca wabah yang terjadi. Hal tersebut diperkuat dengan kegiatan penulis yang berada pada lokasi penelitian dengan menetap di salah satu rumah warga untuk mendapatkan akurasi data yang komplet. Jenis data yang didapat adalah data kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung kepada wilayah tersebut mengenai konflik sosial dan faktor-faktor penyertanya. Pemilihan informan didasarkan pada hasil wawancara

² *Srawung* artinya berinteraksi dengan orang lain seperti tetangga, saudara, teman dan lain-lain

dengan Perangkat Desa Grogol untuk memudahkan penggalian informasi serta disesuaikan dengan bentuk-bentuk konflik yang kerap terjadi dalam merespons setiap rangkaian proses pembangunan bandar udara. Sebagai pelengkap data, penulis juga menggunakan RPJMD Kabupaten Kediri dan RPJMDes Desa Grogol yang bisa menjadi studi dokumen yang kemudian dapat melihat komparasi dari segi kondisi sosial, pekerjaan, hingga aspek-aspek lain pra, saat, dan pasca dari adanya pembangunan bandara ini. Serta juga menggunakan studi literatur sebagai pelengkap referensi dan informasi mengenai data dan literatur pada penelitian-penelitian serupa yang sudah ada sebelumnya.

HASIL dan PEMBAHASAN

DESA GROGOL DALAM MERESPONS PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Dalam konteks sosio kultural, Desa Grogol merupakan desa dengan kearifan lokal masyarakatnya yang masih erat serta didukung dengan kondisi geografis yang memiliki lahan pertanian yang luas serta masyarakat di dalamnya yang mayoritas merupakan seorang petani. Pastinya kondisi geografis di sebuah wilayah mempengaruhi pola-pola kegiatan tradisi yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sama dengan yang ada di Desa Grogol yakni perayaan-perayaan tradisinya juga berkaitan dengan kegiatan pertanian misalnya di Dusun Grogol terjadi upacara adat meminta hujan setiap tahunnya agar lahan pertanian di sana tidak kekurangan air serta penduduk yang tinggal juga tidak kekurangan air sebagai salah satu modal utama dalam kehidupan warga.

“Dulu pas sebelum pembangunan bandar udara Mas, tiap tahun ada upacara minta hujan di sini, tradisi yang terus dilakukan nah pas pembangunan bandar udara ini jadi nggak ada ya kurang lebih 2 sampai 3 tahun ini nggak ada perayaan itu Mas, lahannya nggak ada, debu ke mana-mana bertebaran ini lho” (Muwardi, 68 tahun).

Adanya pembangunan bandar udara juga telah mengubah perayaan serta tradisi yang dimiliki oleh Desa Grogol yakni tradisi minta hujan. Sebuah tradisi yang sebelum bandar udara dibangun sudah ada dan sekarang disederhanakan bahkan tidak dilakukan karena adanya proyek yang luar biasa besarnya tersebut.

Kegiatan PKK juga menjadi kegiatan bertemunya warga Desa Grogol khususnya bagi wanita untuk melakukan koordinasi, pertemuan, hingga bertukar informasi mengenai perkembangan anak dan lain sebagainya. Kegiatan bakti sosial di setiap hari Jumat juga masih diadakan untuk warga masyarakat yang taraf kehidupannya masih jauh dari kesejahteraan sehingga akan terbantuan melalui adanya program ini. Selain itu, kegiatan olahraga dan kepemudaan juga masih erat dan solidaritas di desa ini terbukti dari sejumlah prestasi yang ditorehkan oleh pemuda-pemudi di Desa Grogol dalam bidang kepemudaan. Ada pula kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, sedekah bumi, tradisi keagamaan yang menjadi bentuk kegiatan rutin tahunan. Kegiatan gotong royong yang dilakukan juga biasanya digunakan untuk membangun palang pintu desa, gapura desa, pembenahan pos kamling yang merupakan infrastruktur desa yang digunakan oleh warga di sana. Didukung juga dengan adanya

kegiatan-kegiatan pengukuh keakraban warga seperti arisan, pertemuan RT/RW, ronda malam, pengajian, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut juga menunjukkan adanya hubungan dan interaksi sosial yang kuat di antara warga di sana serta menjadi bentuk konkret juga adanya kolaborasi berbingkai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang. Selain menjadi sesuatu yang diperingati setiap tahun, tradisi di sana juga berkembang dan tetap dipertahankan oleh warga di sana. Selain orang dewasa, anak-anak juga masih menggunakan permainan tradisional dalam kegiatan permainan keseharian di sana. Namun tidak bisa dipungkiri, adanya internet juga kemudian menciptakan kehidupan maya baru di wilayah tersebut. Tetapi, hal tersebut juga dijadikan oleh beberapa warga sebagai tempat untuk berjualan secara online melalui E-Commerce yang tersedia serta menjadi ladang bisnis baru bagi penjual pulsa data untuk makin mengembangkan target pasarnya.

Ada pula seni pertunjukan yang masih dipertahankan di Desa Grogol yakni pertunjukan wayang kulit yang menjadi seni pertunjukan yang selalu hadir pada perayaan-perayaan adat di sana misalnya peringatan satu Suro, perayaan tahun baru masehi, hingga acara-acara perayaan khitan hingga pernikahan juga masih menampilkan wayang kulit sebagai bentuk kesenian yang digandrungi masyarakat di sana. Masyarakat Desa Grogol menyukai wayang kulit dikarenakan pada pertunjukan ini ragam seni ditampilkan serta banyaknya lagu-lagu dan tembang yang tidak banyak klasik namun mengadopsi dari kultur milenial sehingga memang pertunjukan wayang kulit di sana bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa dan tua namun banyak dari pemuda yang ikut menonton serta menikmati sajian wayang kulit tersebut. Adanya pertunjukan seni di Desa Grogol juga ternyata menimbulkan semangat bagi generasi-generasi muda di sana untuk mengembangkan seni, dengan meningkatkan kemampuan Karang Taruna di karawitan. Serta pada tataran sekolah formal, jenis-jenis kesenian tradisional juga sudah diajarkan dan dipentaskan pada acara perpisahan sekolah, peringatan kemerdekaan RI, dan masih banyak acara lagi. Ditambah lagi adanya kirab-kirab dan kreativitas pemuda yang juga sering dilakukan sebelum adanya pembangunan bandar udara.

Seperti yang sudah dipaparkan pada tataran sebelumnya, Desa Grogol merupakan desa dengan kearifan dan guyub rukun yang sangat erat. Terbukti dari sejumlah kegiatan warga dalam pengorganisasian, sosial ekonomi, hingga kultural yang berbasis lokal serta masih dibina secara berkesinambungan pada masa itu. Didukung pula dengan kreativitas warganya dalam mengelola lingkungan juga sangat “apik”. Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam bunga serta tanaman-tanaman sayur secara hidroponik untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Kegiatan keorganisasian juga berjalan dengan lancar dikarenakan adanya penggerak yang dalam hal ini warga masyarakat di Desa Grogol yang memang solid serta erat tali persaudaraannya. Selain itu, pada tingkat peribadatan dan keagamaan masyarakat Desa Grogol juga tertib untuk menjaga tempat ibadah yang ada seperti masjid, dan mushola saat dzuhur memang masjid tidak pernah sepi banyak sekali jamaah yang turut beribadah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ditambah juga dengan adanya perayaan-perayaan serta kenduri yang hingga kini masih dilaksanakan oleh warga Desa Grogol sebagai peringatan terhadap sesuatu misalnya, peringatan

Maulid Nabi Muhammad S.A.W, peringatan satu Muharam, hingga aktivitas belajar baca tulis Al-Qur'an juga masih dilakukan di masjid serta musala di Desa Grogol.

Namun hal tersebut berubah sejak adanya proyek pembangunan bandar udara, segala bentuk perubahan dalam sendi kehidupan masyarakat Desa Grogol mulai nampak. Ditambah lagi dengan sejumlah pengumuman dari pihak-pihak terkait yang akan mendirikan bangunan besar yakni bandar udara di rumah-rumah warga Desa Grogol. Hal tersebut menjadi sesuatu yang mengejutkan karena pada awalnya mereka menganggap proyek besar di desa mungkin hanya pada pembangunan kantor desa atau pembenahan pos kamling yang akan melibatkan banyak personel dari anggota dari Desa Grogol untuk saling bekerja sama.

“Warga sini mikir e proyek yang besar itu pol mbuat gapura dan perbaikan masjid mungkin ya Mas, lha ini bandara dan pasti gede terus waktu pengerjaan e ya lama, ini yang kami jadi bingung. Juga kita nggak sampai mikir lek tiba-tiba desa yang kita gunakan untuk berkembang sama anak istri ini bakal ditekani orang banyak dari luar” (Joko, 40 tahun).

Namun, hal tersebut sangatlah berbeda dari apa yang mereka definisikan seperti biasanya. Kali ini proyek pembangunan bandar udara tersebut tepat berada di desa mereka dan akan menyerap ratusan bahkan ribuan pekerja baik dari dalam Desa Grogol maupun dari luar Desa Grogol. Dengan kondisi tersebut, warga di sana juga mulai khawatir apabila dengan masuknya pekerja dari luar akan menambah masalah baru di desa tersebut, mengubah kerukunan warga, hingga membuat adanya kubu-kubu yang saling membela suatu blok. Selain itu, adanya pendatang juga menimbulkan adanya adaptasi baru juga bagi warga di sana dalam menerima, memberikan lingkungan yang sesuai, hingga aksesibilitas pendatang tersebut. Banyak dari warga di Desa Grogol yang mulai bingung hingga resah terkait adanya pengumuman tersebut.

Perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya pada resahnya warga akan datangnya pendatang dari luar, namun warga juga terlihat mulai adanya gesekan-gesekan dari dalam berkaitan dengan masuknya warga-warga dari Desa Grogol ke dalam proyek tersebut, namun itu tidak semua warga bisa masuk ke dalam proyek tersebut serta bisa bekerja di sana. Protes kepada kepala desa juga mulai dilakukan dengan sejumlah warga yang mendatangi kantor desa yang kemudian selain melakukan protes juga menyuarakan kekesalan mereka akan dibangunnya bandar udara ini. Warga menyuarakan mengenai rekrut pekerja di bandara sebagai maksud awal datangnya mereka ke kantor desa. Tetapi, mereka akhirnya juga menyampaikan mengenai kompensasi yang diberikan proyek bandar udara ini terhadap warga di desa terdampak yakni sembako setiap 2 bulan sekali yang ternyata lambat dalam distribusinya, selain itu warga juga mengeluhkan masalah suara-suara yang terjadi pada masa pembangunan ini juga menimbulkan polusi suara dan mengganggu. Berikut salah satu ungkapan yang disampaikan warga :

“Warga di sini itu sebenarnya juga jengkel Mas sama proyek ini terlebih ke kepala desa, ya gimana lagi mereka tahunya ya ini kan yang buat acara ya kantor desa dan

yang ngerti ya mereka to. Wajar kalau protes mereka ke sana, juga masalah kompensasi yang dijanjikan itu lha mana to Mas, sering telat-telat, kadang kita ya mikir ini diapusi (dibohongi) apa gimana ya kita? Ya selain itu bising e mas, ora karuan, marakke ora iso turu, anak-anak juga pas belajar terganggu, wes pokoke ya kita ini isone mung lapor dan protes Mas. Perkoro nerimo ne pie kuwi urusan mburi” (Wardiman, 53 tahun).

Protes kepada kepala desa dan *sowan*³ ke kantor desa menjadi pemandangan yang sangat biasa ketika pembangunan bandar udara terjadi, protes yang terjadi juga merupakan bentuk luapan keinginan warga di sana terkait pembangunan bandar udara ini. Bahkan warga juga sering mendatangi rumah kepala desa dan perangkat desa yang lain untuk menyampaikan keinginan-keinginan tersebut serta terus mendesak agar keinginan tersebut tersampaikan. Meski tidak arogan, hal ini juga ternyata menimbulkan adanya kemacetan di jalan, bertambahnya warga yang terserang ISPA akibat terpapar dengan debu yang bertebaran, serta banyak pelayanan di desa yang semestinya berjalan lancar terhalang akibat adanya sejumlah protes dan aksi yang dilakukan oleh warga.

Dengan semakin banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah Desa Grogol pasti hal ini juga membuat sebagian warga di sana memutar otak dengan membuat sejumlah warung hingga indekos yang fungsinya untuk memberikan layanan bagi pendatang dan juga untuk menambah pendapatan baru warga di sana. Adanya sejumlah warung ini juga terkadang menimbulkan banyak konflik yang terjadi di dalam rumah misalnya seperti penuturan berikut :

“Sekarang banyak warung sana-sini, Mas. Saya di rumah masak jadi nggak laku, ayah e anake ikut njajan semua di warung nggak mau makan di rumah. Saya bingung ini ada warung sebenarnya ya mbantu orang-orang, tapi kok bikin mawut ekonomi keluarga kalau njajan di warung terus tiap hari. Padahal di warung itu juga belum pasti bersih, lo, Mas. Tapi ya gitu jadi suering njajan di warung” (Wati, 43 tahun).

Menurut penuturan warga tersebut adanya warung-warung yang bermunculan ketika bandar udara terjadi juga akan menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi karena minat makan di rumah makin berkurang dan cenderung untuk membeli makanan di luar yang dianggap lebih nikmat dan sedap. Dengan tumbuhnya warung ternyata juga tidak selamanya memiliki efek positif, banyak dari warga yang kemudian geram khususnya ibu-ibu yang menyayangkan jika masakan di rumah tidak laku hingga alasan-alasan kebersihan serta kesehatan yang mungkin kurang higienis ketika membeli di warung tersebut. Kekhawatiran tersebut bukan hanya pada satu keluarga saja, namun ketika proses wawancara ada juga ibu-ibu yang menyampaikan maksud yang sama dengan penuturan Wati (43) tadi. Adanya warung-warung yang timbul pada masa pembangunan bandar udara ini didukung dengan dimudahkannya mereka membangun petak kecil di antara proyek yang memudahkan para pekerja untuk mengakses warung tersebut di saat mereka istirahat. Untuk barang yang dibeli beragam, mulai dari makan siang, rokok, hingga

³ Sowan (Bahasa Jawa) artinya berkunjung

sekadar membeli permen dan es teh. Hal ini yang kemudian membuat makin berkembangnya warung-warung di sana dikarenakan peluang serta permintaan yang juga besar dari pekerja bandar udara tersebut. Alasannya beragam mulai dari hanya sekedar memerlukan jajanan ringan hingga membutuhkan makanan pokok untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam nanti. Oleh karena itu, warung-warung di sana juga buka selama 24 jam dengan adanya pergantian penunggu warung di setiap harinya.

Pada masa pembangunan bandar udara, Desa Grogol juga terlihat lebih ramai dibandingkan sebelumnya yakni dengan adanya sejumlah aktivitas warga di sana yang mendukung adanya kegiatan pembangunan bandar udara dengan dibukanya warung, toko, hingga *minimarket* serta ditambah juga dengan ramainya aktivitas di lahan pembangunan bandar udara itu sendiri. Pemandangan truk dan alat-alat berat yang melintas juga menjadi pemandangan yang sangat biasa setiap harinya. Tak heran apabila banyak anak-anak kecil yang diimbau untuk di rumah saja karena ditakutkan akan tertabrak alat-alat berat proyek tersebut. Melalui fenomena tersebut juga menyiratkan sebuah arti bahwa pembangunan bandar udara telah mengubah pola kehidupan dan permainan anak-anak yang semula bisa dilakukan di luar ruangan sekarang hanya terbatas di dalam ruangan bahkan gadget menjadi alternatif permainannya.

“Kalau siang rame mas, truk banyak yang lewat terus molen-molen berat banyak yang lewat juga. Akhirnya ini kemarin ada pengumuman biar anak-anak di dalam rumah saja, biar aman ngga kena debu dan bahaya juga kalau ketabrak. Sebenarnya ya kasian mereka biasanya bisa bebas main di luar sama teman-teman e sekarang dadi dibatasi semua Mas, parah lah gini ini, akhire mereka ya mainan hp terus di rumah” (Nanik, 43 Tahun).

Dengan semakin bertambahnya hari saat pembangunan bandar udara terjadi, ternyata bukan hanya debu-debu saja yang menjadi perkara besar. Hal tersebut terlihat ketika pada masa pembangunan bandar udara ternyata banyak anak-anak yang kemudian seperti “dikurung” dari kehidupan masa anak-anaknya yang bisa bermain di luar ruangan dengan bebas. Alasannya juga beragam yang paling mendasar adalah debu yang bertebaran, sehingga ditakutkan akan menyebabkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), serta juga adanya risiko tertabrak atau terkena alat-alat berat pada proyek ini sehingga mereka harus “dirumahkan” sementara waktu hingga pembangunan bandar udara selesai. Memang terlihat aneh, tetapi itulah yang terjadi ketika pembangunan bandar udara ini. Bukan tidak mungkin dengan adanya fenomena tersebut membuat penggunaan gadget di kalangan anak-anak wilayah Desa Grogol juga meningkat pada masa pembangunan bandar udara ini berlangsung. Orang tua juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika sudah ada pemberitahuan dari ketua proyek di sana bahkan juga diumumkan melalui kantor desa, sehingga mau tidak mau mereka menuruti hal tersebut untuk keamanan dan ketentraman kehidupan mereka, meski harus mengorbankan kebiasaan-kebiasaan menarik anak-anak seperti sedia kala.

BENTUK-BENTUK KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI DESA GROGOL PADA MASA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA

Kelanjutan dari adanya setiap pembangunan adalah proses penyesuaian dari setiap warga masyarakat di dalamnya terkait implementasi kebijakan, aturan, hingga sistem-sistem baru dari sebuah pembangunan itu sendiri. Zulfikar dan Rukayat (2017) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi tergantung pada implementability atau sejauh mana kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu content of policy (konten kebijakan) dan context of implementation (konteks pelaksanaan) (Zulfikar dan Rukayat, 2017). Dalam hal ini, pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri dengan ring satunya yang terletak di Desa Grogol ini memiliki konten kebijakan berupa adanya sistem ganti untung dan pembebasan lahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini serta konteks pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana proyek pembangunan bandar udara ini untuk memahami karakteristik dari masyarakat yang berada di Desa Grogol. Karakteristik masyarakat Desa Grogol merupakan masyarakat Jawa yang masih memegang sistem adat yang kuat di dalamnya, oleh karena itulah setiap kebijakan dan sistem yang ada juga harus sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Grogol. Etika dalam penyampaian juga sangat penting dalam rangka memberikan informasi berkaitan dengan setiap kebijakan yang ada, serta babak demi babak yang akan dilalui dan disampaikan kepada masyarakat juga harus sesuai serta tidak menimbulkan kesenjangan hingga konflik di antara masyarakat.

Konflik merupakan proses perbedaan, pertentangan, dan atau perbenturan antara berbagai aktor kepentingan terhadap sumber daya material maupun non-material pada konteks sosial tertentu (Coser, 1957; Ramsbotham dkk, 2005; Bartos dan Wehr, 2003; Carpenter, 1988). Dalam Farida (2013) dijelaskan, bahwa setiap konflik memiliki dimensi hubungan kuasa di antara berbagai aktor di dalamnya yang dibentuk oleh variabel kekuatan (power) baik secara ekonomi, politik, dan budaya. Rangkaian proses pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri ini tidak hanya berupa peletakan alat berat saja pada suatu wilayah, namun adanya babak demi babak mulai dari pembebasan lahan hingga ganti untung ini telah menimbulkan wajah-wajah baru bagi lingkungan di Desa Grogol. Seperti yang kita tahu bahwa konflik terjadi apabila ada dari satu anggota merasa tidak sesuai dengan apa yang dirasakan sehingga menimbulkan protes hingga konflik yang berkepanjangan. Awal mula terjadinya konflik di Desa Grogol ini terjadi pasca pengumuman akan dibangunnya bandar udara di wilayah Desa Grogol, meski ada yang menyetujui dan menerima pengumuman tersebut namun tidak sedikit dari masyarakat di Desa Grogol yang kemudian melakukan protes hingga aksi demo di kantor desa setempat. Kantor desa dianggap sebagai pusat dari segala informasi berkaitan dengan bandar udara ini sehingga massa juga langsung mendatangi kantor Desa Grogol untuk menanyakan perihal maksud dari pembangunan bandar udara ini hingga bagaimana kondisi nasib mereka nanti ke depannya.

“Dulu habis pengumuman itu nggak lama setelahnya mas, warga langsung berbondong-bondong ke kantor desa untuk bertemu dengan pak kades. Ya bisa dilihat mereka memang ke sini tujuannya bukan hanya main-main saja, tapi ya protes dan seperti nggak terima kalau ada pembangunan bandar udara ini.” (Perangkat Desa Grogol).

Merespons apa yang warga lakukan dengan mendatangi kantor desa tersebut pasti para perangkat desa juga kebingungan mengapa tiba-tiba mereka berdatangan ke kantor desa, awalnya perangkat desa di sana hanya mengira ini apakah ada urusan administrasi yang akan diurus ke kantor desa tetapi mengapa dengan volume jumlah masyarakat yang cukup banyak dan berdatangan bersama-sama. Ternyata betul, memang yang diadakan kepada kantor desa dan ingin menemui kepala desa berkaitan dengan pembangunan bandar udara. Pembangunan bandar udara ini menurut aduan masyarakat yang datang ke kantor desa ini sepertinya akan menyengsarakan dan bukan menyejahterakan, meski kepala desa sudah memberikan gambaran.

Aksi masyarakat mendatangi kantor Desa Grogol ini juga tidak hanya berlangsung satu dan dua hari saja, melainkan hampir seminggu sekali warga berdatangan ke kantor desa untuk menyampaikan aduannya tentang pembangunan bandar udara ini. Bahkan, ada yang membawa anak mereka yang terkena batuk tidak berhenti sebagai bukti dari dampak dari pembangunan bandar udara ini. Meski bukan kategori yang besar, namun sering juga terjadi adu mulut dari warga dengan kepala desa atau perangkat desa di Desa Grogol ini, hanya saja suasana bisa diredam apabila ada seseorang yang menengahi aksi-aksi tersebut.

“Ada juga Mas yang sampai bawa anaknya ke sini, batuk-batuk gitu katanya juga karena debunya ke mana-mana sampai masuk rumah mereka” (Perangkat Desa Grogol).

Aksi-aksi protes warga Desa Grogol ini sebenarnya bukan tanpa alasan, mereka menuntut adanya tindakan yang tepat yang tidak menyengsarakan masyarakat di sana sebagai dampak dari pembangunan bandar udara ini. Bahkan, bagi masyarakat yang kurang puas serta kurang tersampaikan aspirasinya ketika berada di kantor desa mereka langsung mendatangi rumah kepala Desa Grogol untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mengadukan apa yang mereka alami. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Desa Grogol sendiri bahwa memang beberapa kali warga sempat mendatangi rumahnya untuk mengadukan masalah ini. Sebagai pelayan masyarakat mereka juga tidak bisa menghindar apalagi ini menyangkut dengan kondisi Desa Grogol beserta penduduk di dalamnya.

“Kadang itu malah sampai datang ke rumah saya Mas, mereka kok kayak kurang sip kalau Cuma di kantor. Ya tetap saya layani, saya jelaskan seperti ini nanti ke depannya. Untuk masyarakat Grogol yang nurut ya nurut saja mas, kalau yg kritis wahh susah dibilangi mintanya ganti rugi terus kami terus mau gimana. Di rumah saya juga gitu mas, tidak terus suasana lancar tapi ya pasti sempat adu argumen lalu

diskusi namun saya belokkan ke guyonan atau sekadar meminum kopi dan gorengan mas biar suasananya jadi cair, kalau nggak gitu wah bisa kacau semuanya mas” (Kepala Desa Grogol).

Memang ketika terjadi gesekan dan konflik seperti yang digambarkan oleh kepala desa dan perangkat desa di Desa Grogol hal yang paling bisa mereka lakukan adalah meredam hal tersebut serta mengalihkan pada pembicaraan lain. Karena ditakutkan apabila terus dilakukan perbincangan dengan konteks pembangunan bandar udara suasana akan makin kacau dan kemudian akan terjadi perselisihan antara warga Desa Grogol dan perangkat desa yang diajak adu argumen tersebut.

Kejadian demi kejadian konflik di Desa Grogol ini juga tidak hanya dalam bentuk perlawanan kepada perangkat desa beserta kepala desa yang ada, melainkan ada juga konflik sesama warga yang memiliki lahan yang terkena bandara kemudian berseteru yang penyebabnya adalah masalah pembebasan lahan dan ganti untung. Sistem ganti untung yang diterapkan oleh penyelenggara proyek ini memang menurut mereka sudah sangat adil, namun kekacauan demi kekacauan timbul di masyarakat dalam sistem ganti untung ini. Misalnya saja perseteruan antara Ibu Ola dan Ibu Luna dalam proses ganti untung ini, hal ini didasarkan pada babak ganti untung yang berbeda di antara keduanya. Ibu Ola mendapatkan ganti untung pada periode pembebasan lahan yang pertama yang dihargai dengan harga 11 juta per rumah (per 14 meter) nya. Kemudian, Ibu Luna mendapatkan babak ganti untung serta pembebasan lahan pada periode berikutnya yang berbeda dengan Ibu Ola dan memang betul nominal yang dikonflikkan oleh keduanya adalah sangat nampak hampir dua kali lipat. Melihat hal tersebut, Ibu Ola tidak tinggal diam dia langsung mendatangi Ibu Luna dan menanyakan kebenaran seputar informasi ganti untung tersebut. Ternyata memang benar, ada perbedaan nominal harga pada pembebasan periode pertama dan periode-periode berikutnya. Yang dengan model pembebasan seperti itu juga menjadi permulaan awal dari adanya sebuah konflik di tengah masyarakat Desa Grogol.

Selain itu, adanya konflik-konflik di Desa Grogol tidak hanya melibatkan pertentangan antara dua orang manusia saja, melainkan ada beberapa kasus konflik yang kemudian diluapkan dalam bentuk coretan hingga tulisan-tulisan berisi protes serta tuntutan mengenai pembangunan bandar udara ini. Kekesalan tersebut diluapkan dalam media tulisan di beberapa fasilitas umum seperti jalan raya yang kemudian menimbulkan makin tidak terlihatnya rambu-rambu hingga peringatan mengenai berkendara. Warga juga ramai memperbincangkan masalah tindakan coret-coret jalan raya ini pada saat isu tersebut berlangsung, tak heran apabila banyak dari warga di sana yang turut mengunggah ke media sosial tentang protes yang dilakukan kepada pemilik proyek bandar udara ini. Menurut beberapa informan yang saya temui di lapangan, tindakan-tindakan coret-coret jalan raya ini dilakukan oleh sekelompok pemuda di Desa Grogol yang kecewa mengenai lowongan pekerjaan yang sulit diakses di proyek ini serta adanya beberapa kasus debu-debu yang terus bertebaran yang menyebabkan beberapa penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Munculnya ragam konflik sosial di tengah masyarakat Desa Grogol ini juga bukan tanpa alasan. Mereka kebanyakan menuntut dan meminta kejelasan mengenai proyek pembangunan bandar udara ini. Karena pada masa pembangunan bandar udara, masyarakat akan memperjuangkan dan menuntut secara hukum hak-hak yang telah dilanggar dalam proses pembebasan lahan atau ganti untung dalam proyek tersebut (Sardi dkk., 2020). Oleh karena itu, sebenarnya konflik-konflik sosial yang bermunculan tersebut juga merupakan bukti tuntutan hingga luapan emosi yang disampaikan dalam beragam media. Dan dengan munculnya konflik-konflik tersebut juga akan mengubah hubungan-hubungan sosial yang telah terbentuk lama yang kemudian berubah menjadi renggang dan memerlukan penyesuaian kembali. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Praditya (2021) bahwa keberadaan bandara membawa indikasi yang baik terhadap mata pencaharian dan pendapatan dalam lingkup ekonomi, namun tidak cukup baik terhadap lingkup sosial karena tidak membuat perubahan berarti pada akses jaminan kesehatan, terlebih terjadi relokasi yang mengharuskan perpindahan tempat tinggal atau tempat usaha penduduk. Meski dirasa akan menimbulkan dampak positif bagi perekonomian di sebuah wilayah, namun dengan adanya pembangunan bandar udara ini telah mengubah ikatan-ikatan sosial akibat konflik yang terjadi.

Konflik Simbolik

Selain konflik vertikal dan horizontal, adanya pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri ini juga menyebabkan adanya konflik simbolik yang terdapat di beberapa titik di kawasan Desa Grogol. Levi-Strauss dalam Harrison (1995) menyebutkan bahwa adanya simbol merupakan arti, tanda, dan nilai yang menyangkut interpretasi mereka sendiri. Kemudian Harisson (1995) melanjutkan bahwa sebenarnya konflik simbolik ini identik dengan simbol politik, simbol politik adalah modal simbolik dan uang adalah modal ekonomi. Terdapat klasifikasi tipe dari konflik simbolik yang berjumlah empat yakni properti, status, kepemilikan dan emosional (Harisson, 1995). Melalui pendefinisian tersebut adanya konflik simbolik juga sebagai bentuk properti maksudnya adalah sebagai media untuk mengungkapkan sesuatu tentang perubahan yang terjadi, kemudian status juga sangat berpengaruh terhadap konflik simbolik yang terjadi bagaimana aktor-aktor yang berperan lahir dari golongan seperti apa, yang ketiga mengenai kepemilikan yang dilegitimasi untuk kepemilikan suatu wilayah, serta yang keempat mengenai emosional yang juga syarat menjadi pemicu adanya konflik simbolik ini. Dengan pengklasifikasian tersebut ternyata juga menjadi sebuah kecocokan antara teori dengan situasi di lapangan yang hingga kini masih ditemui sejumlah coretan-coretan kekesalan akibat adanya pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri ini.

Menurut berita dan informan yang penulis temui di lapangan terkait coretan-coretan ini ternyata tidak hanya terjadi di Desa Grogol, melainkan juga terjadi di desa-desa lain yang hingga kini masih belum setuju dengan adanya pembangunan bandar udara ini. Selain tidak setuju, mereka juga mengeluhkan sejumlah penyimpangan-penyimpangan janji yang terjadi seperti sembako yang akan diberikan tersebut dan diluapkan dalam bentuk tulisan mengenai nasib mereka ketika kompensasi tersebut tidak terdistribusikan dengan tepat. Ditambah lagi dengan sejumlah relokasi

serta ancaman pelebaran wilayah bandar udara ini, juga makin membuat masyarakat di wilayah terdampak khususnya Desa Grogol turut berpikir keras melihat hal ini. Yang pada akhirnya kekesalan serta emosi tersebut digambarkan melalui simbol-simbol dengan coretan tulisan menggunakan vandalisme yang didominasi dengan warna putih. Dalam keterangan lanjutan yang diberikan oleh warga di sana perilaku tersebut didominasi juga dilakukan oleh pemuda-pemuda desa yang kesal dengan sulitnya untuk bisa masuk menjadi pekerja di proyek pembangunan bandar udara ini. Meski juga sudah diingatkan masih saja banyak jalan raya yang digambari dengan luapan kata-kata dan emosi kekesalan dari setiap warga yang ada di Desa Grogol. Meski tidak hanya pemuda saja yang melakukan tersebut, tetapi hingga detik ini bekas dan coretan tersebut masih tersusun dengan jelas. Banyak warga dari luar wilayah desa yang kerap mengeluhkan rambu lalu lintas di jalan yang sudah mulai tidak tampak akibat dari coretan kekesalan yang ada. Bahkan, ada yang sudah dihapus dengan beberapa cairan untuk menghapus vandalisme tetapi hal tersebut juga tidak diindahkan. Lebih-lebih mereka akan mencoret-coret lagi di wilayah lain dengan luapan kekesalan yang sama yakni pembangunan bandar udara yang makin menyengsarakan masyarakat.

PERAN TOKOH LOKAL DAN TOKOH AGAMA SEBAGAI PENYELARAS KONDISI MASYARAKAT PASCA KONFLIK

Kehidupan masyarakat Desa Grogol selain berkaitan dengan urusan pemerintahan juga pastinya menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Setiap agama dan kepercayaan mengajarkan pentingnya untuk berbuat baik antarsesama manusia di muka bumi ini. Dengan kebaikan dan hubungan baik yang terjalin diharapkan akan menciptakan bingkai kerukunan yang indah ke depannya. Mengingat adanya konflik sosial di Desa Grogol yang melibatkan sejumlah kalangan dan aktor tersebutlah peran dan penguat mengenai adat dan agama sangat penting adanya. Selain sebagai upaya kuratif dalam menyelesaikan masalah konflik sosial di tengah masyarakat, adanya peran-peran dari tokoh masing-masing adat dan agama ini penting adanya untuk proses pemulihan pasca konflik sosial yang terjadi. Mengingat penanganan konflik pada pasca konflik memiliki peranan dalam upaya mendamaikan kelompok masyarakat yang terlibat konflik, yaitu rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi (Dauh dkk., 2020).

Rekonsiliasi antara lain dapat dilakukan dengan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Rekonsiliasi perlu dilakukan apabila potensi konflik yang terjadi dikarenakan adanya rapuhnya kohesi sosial di tengah masyarakat akibat beragam kekerasan struktural dalam dinamika suatu komunitas masyarakat (Astri, 2011). Rehabilitasi, dilakukan pasca konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Rekonstruksi meliputi: [a] pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; [b] pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian; [c] perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik; [d] perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; [e] perbaikan dan penyediaan

fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhandasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; [f] perbaikan dan pemulihan tempat ibadah (Aziz SR, 2019). Dalam Nurdin (2013) disebutkan bahwa nilai-nilai agama bertransformasi dan aplikasi secara apik dalam ranah budaya yang dipraktikkan sepanjang sejarah yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut menjadi formula dalam menyelesaikan konflik dan sengketa dalam masyarakat (Nurdin, 2013). Oleh karena itu, nilai-nilai agama dan adat yang terbentuk dalam kearifan lokal pada masyarakat tersebut bisa menjadi salah satu sarana dalam upaya penyelesaian konflik sosial khususnya yang ada di Desa Grogol kaitannya dengan sejumlah sengketa yang terjadi akibat pembangunan bandar udara di wilayah tersebut. Dengan bekal agama serta adat yang ada pada masyarakat di Desa Grogol, pastinya lebih dipercaya dan bisa menjadi sarana untuk pemulihan sosial pada lingkungan yang telah menjadi lokasi konflik di masyarakat. Serta pemulihan-pemulihan yang terjadi dengan melibatkan agama dan adat juga menggunakan sistem yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana serta situasi yang sedang berlangsung seperti apa yang dapat memunculkan beragam solusi serta keterbaruan pemikiran agar menghindari konflik-konflik susulan.

Oleh karena itu, peran dari tokoh agama serta tokoh lokal sangat penting dalam hal ini. Sebagai alat kontrol sosial masyarakat, keduanya memegang peranan penting dalam setiap kejadian dan perubahan berbasis sosial kultural di masyarakat tersebut. Apalagi di Desa Grogol ini budaya Jawa masih dipegang erat yang terbukti pada setiap perayaan dan peringatan-peringatan kegiatan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dalam setiap acaranya. Misalnya saja seperti yang sudah disebutkan pada paparan sebelumnya mengenai adanya upacara adat di Desa Grogol untuk meminta hujan yang saat ini dihentikan sejak pembangunan bandar udara berlangsung diganti dengan acara peringatan kecil di rumah warga atau balai pertemuan di desa. Sama halnya dengan konflik sosial yang juga menjadi akibat secara sosial dalam pembangunan bandar udara ini juga bisa dikaji solusinya melalui kaca mata adat dan agama. Selain itu, peran dari tokoh lokal dan agama juga sangat penting dalam memberi informasi kepada masyarakat di sana yang dilakukan dalam forum diskusi keagamaan serta pertemuan dalam perayaan adat sehingga juga kolaborasi dari pemerintah desa dan tokoh-tokoh lokal dan agama ini perlu dilakukan sebagai bentuk penanganan secara kuratif konflik-konflik yang telah terjadi. Kaitannya dengan fungsi dari tokoh agama dalam konflik sosial yang terjadi adalah seperti yang disampaikan oleh Suprpto (2015) bahwa tokoh agama bertugas untuk mengampanyekan nilai-nilai agama untuk pembangunan perdamaian, membatasi isu-isu negatif selama dan setelah konflik, menahan orang dari prasangka dan kebencian terhadap faksi lain, hingga menengahi dan merundingkan konflik. Oleh karena itu, bisa menjadi penengah sekaligus memberikan pedoman-pedoman peretas konflik berbasis agama-agama yang dianut oleh masyarakat Desa Grogol.

Di sisi lain dengan adanya tokoh lokal atau tokoh masyarakat ini juga membantu dalam kelancaran setiap kegiatan pembangunan bandar udara. Bukan sebagai jalan untuk menghalalkan segala cara, melainkan sebagai bentuk konkret dari keterkaitan antara budaya dengan situasi

masyarakat saat pembangunan bandar udara berlangsung. Melihat situasi Desa Grogol yang syarat akan budaya ini, menggunakan jalan utama untuk meretas konflik-konflik yang ada yakni memang dengan peran dari tokoh lokal di sana. Seperti yang terlihat pada kondisi sekarang dan sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya, bahwa masyarakat sekarang lebih mempercayai peran dari kamituwo atau orang yang dituakan di masing-masing dusun sebagai penyampai informasi dari masyarakat ke pemerintah desa atau sebaliknya. Dengan peranan tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat tersebutlah yang menjadi upaya penanganan konflik di dalam pembangunan bandar udara ini. Selain menjadi bentuk kuratif, penanganan yang dilakukan oleh tokoh lokal di Desa Grogol ini juga bisa menjadi tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik serupa yang juga masih menyangkut pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri. Jalan konflik yang terjalin di Desa Grogol tersebut juga terjadi tidak memandang dari dan seperti apa adat yang mereka anut, mereka beranggapan sesuatu yang kurang tepat dan baik mengenai nasib mereka saat pembangunan bandar udara berlangsung.

“Di sini peran saya mungkin yang dituakan di masyarakat Bedrek Selatan, Mas. Akhirnya sekarang banyak kejadian yang saya tengahi, biar tidak terus menerus berlarut-larut, Mas. Mengurangi iri dengki saja pesan saya ke warga itu, jangan terlalu kebandhan untuk cari laba di bandara ini, budayakan tepa slira” (Kamituo Dusun Bedrek Selatan).

Dalam keterangan yang diberikan oleh kamituwo di Dusun Bedrek Selatan ini ada sesuatu yang menjadi garis bawah keterangan untuk merangkai kerukunan pasca konflik yang terjadi. Yakni yang pertama adalah mengurangi iri dengki, karena dengan rasa iri dengki yang selalu dipertahankan juga akan mengancam keutuhan sebuah komunitas masyarakat. Serta dalam keterangan yang diberikan, beliau juga menyebutkan untuk masyarakat agar tetap tepa slira dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang menyangkut pembangunan bandar udara ini, *tepa slira* merupakan sikap tenggang rasa ketika menghadapi situasi konflik yang begitu rumit hingga bisa mengancam kondisi sebuah keluarga sekalipun. Bagi kamituwo di sana, tanpa dua hal tersebut tidak mungkin kondisi yang sudah berkonflik ini akan kembali ke situasi awal tanpa konflik, bahkan apabila diteruskan lagi akan menciptakan konflik-konflik baru yang akan mengancam keutuhan dari anggota masyarakat yang ada. Meski tidak mudah, dua hal tersebut kembali dibiasakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana dalam meningkatkan kerukunan serta mengembalikan situasi ke kondisi awal yang minim dari adanya konflik sosial apalagi dikarenakan proyek pembangunan bandar udara tersebut.

Peran-peran dari tokoh lokal dan tokoh agama di Desa Grogol ini tidak bisa berjalan sendiri begitu saja, melainkan harus ada kolaborasi yang baik dengan masyarakat juga sebagai objek dan aktor yang berkenaan langsung dengan konflik yang terjadi. Masyarakat diharapkan juga mengindahkan petuah dan nasihat baik yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Pada tataran keagamaan misalnya, setelah selesai prosesi peribadatan dilakukan semacam sesi untuk pemberian wejangan dari pemuka agama kepada jemaat yang hadir kaitannya dengan proses perbaikan hubungan sosial yang sudah rusak akibat dari pembangunan bandar udara.

Dengan praktik-praktik yang terjadi dalam rangka pemulihan kondisi pasca pembangunan bandar udara yang dikaitkan dengan adat serta agama ini juga menjadi keterbaruan solusi yang biasanya melibatkan pemerintah saja sebagai jalan penyelesaiannya. Padahal, pemerintah desa adalah bagian dari konflik sosial yang terjadi sehingga apabila dijadikan sebagai solusi konflik maka akan bias hasilnya. Peran tokoh lokal dan tokoh agama ini memberikan peran penting juga dalam upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi dengan beberapa cara serta tahapan yang menyesuaikan dengan situasi masyarakat Desa Grogol. Di sisi lain, adanya peran-peran tokoh lokal dan tokoh agama juga bisa meningkatkan ketahanan masyarakat untuk tidak selalu menyalahkan situasi yang ada tersebut melainkan akan mengembalikan setiap isu dan masalah kepada Sang Pencipta serta adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut agar keutuhan tersebut tetap terjalin dan terjaga.

“Peran kami di sini sudah pasti Mas untuk mengembalikan segala kejadian yang telah ada kepada moralitas masyarakat. Segala sesuatu akan diberi kemudahan ketika Allah memberikan petunjuknya, lebih ke mengingatkan saja untuk mengurangi hal-hal semacam itu” (Ustaz Ali)

Dengan demikian menjadi perhatian bersama bahwa pada setiap kasus konflik yang terjadi bisa ditangani melalui peran-peran dari tokoh lokal dan tokoh agama setempat yang memiliki kesegaran di masyarakat. Fungsi dari adanya tokoh lokal dan tokoh agama tersebut untuk jalan solusi pemulihan pasca konflik yang terjadi di Desa Grogol. Mengingat di Desa Grogol sendiri adat istiadat serta upacara-upacara peringatan keagamaan masih dilangsungkan dengan baik, hal tersebutlah yang menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kondisi seperti semula lagi. Meski tidak mudah, hal tersebut menjadi pola-pola baru di Desa Grogol yang menggabungkan prinsip adat dan agama setempat dengan proses pemulihan konflik sosial yang terjadi akibat dari pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri.

KESIMPULAN

Timbulnya konflik sosial yang terjadi di Desa Grogol menjadi ujung sekaligus bentuk konkret dari dampak pembangunan bandar udara. Konflik sosial yang terjadi telah melibatkan aktor-aktor yang tidak memandang strata hingga hubungan kekeluargaan saudara kandung. Adanya konflik vertikal sudah pasti membawa keterlibatan antar strata atas dan bawah untuk berseteru yang berakibat pada sistem pelayanan publik, hubungan-hubungan formal, serta interaksi sosial antar strata tersebut. Ditambah lagi dengan adanya konflik horizontal yang tidak memandang adanya kausalitas kekeluargaan serta saudara kandung juga telah menyebabkan rusaknya hubungan serta relasi sosial keluarga bagi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Serta diakhiri dengan munculnya konflik-konflik simbolik sebagai bentuk kekecewaan, kemarahan, hingga emosi warga atas kebijakan yang ada pada pembangunan bandar udara ini yang tidak peka terhadap warga desa terdampak. Beragam konflik sosial yang terjadi tersebut telah berdampak pada perubahan relasi sosial masyarakat dan menghasilkan hubungan-hubungan sosial baru yang mestinya sudah lama terjalin di antara masyarakat. Dimulai dengan munculnya ketidakpercayaan

sosial masyarakat terhadap informasi-informasi terkait kebijakan dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri ini sehingga masyarakat Desa Grogol sekarang lebih mempercayai peran kamituwo atau tokoh yang dituakan di desa sebagai media informasi dari dan untuk mereka, terjadi pula disintegrasi sosial yang menimbulkan perpecahan antar tetangga dan antar keluarga, serta banyak fasilitas umum seperti jalan raya yang sudah mulai tidak terlihat rambu-rambu lalu lintasnya dikarenakan adanya sejumlah coretan vandalisme sebagai bentuk simbol kekesalan warga terhadap pembangunan bandar udara tersebut.

Sejumlah ketegangan yang terjadi pasca konflik sosial pembangunan bandar udara memang tidak bisa langsung diubah ke posisi awal saat pembangunan bandar udara tersebut belum ada. Hanya saja, upaya-upaya pemulihan hubungan sosial dan integrasi sosial masyarakat berbasis sosial kultural masih digencarkan sebagai upaya resolusi pasca konflik berlangsung. Oleh karena itu, peran dari stakeholders setempat dimulai dari tokoh masyarakat, sangat penting dalam memberikan pemahaman nilai-nilai lokal sebagai penguat serta penghindar dari konflik serupa di masa mendatang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan bandar udara akan menyebabkan dampak secara sosial pada masyarakat desa terdampak. Adanya romantisasi penyejahteraan masyarakat dengan adanya pembangunan sangat terlihat bias hasilnya di lapangan, sehingga diperlukan pertimbangan yang matang untuk meminimalisasi dampak-dampak yang ditimbulkan secara sosial yang dapat merugikan masyarakat desa terdampak. Dengan adanya konflik sosial tersebut juga menjadi bukti sekaligus visualisasi dari dampak pembangunan bandar udara yang paling konkret dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, muncul pola-pola hubungan sosial baru sebagai dampak dari adanya konflik sosial tersebut. Sebagai tindakan pemulihan pasca konflik sosial, kolaborasi tokoh masyarakat desa setempat menjadi upaya efektif dalam resolusi konflik sehingga konflik sosial yang terjadi bisa dihentikan dan tidak berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, S. A., Hamzah, S., Ramli, M. I., Asdar, M., & Pati, S. (2017). Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara menuju Bandar Udara Masa Depan dengan Konsep Airport City:(Studi Kasus: Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5).
- Aisarahmadani, B. (2016). Peran kepemimpinan dalam mengatasi konflik vertikal di lingkungan rumah sakit (Studi Pustaka). SKRIPSI-2015.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2(2), 151-162.
- Aziz SR, A. (2019). Transformasi konflik dan peran pemerintah daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28-41.
- Az-Zahra, Y. F., & Sigit, A. A. (2019). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan

- Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Bartos, J.O. & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Cahya, A. R. (2016). Terminal penumpang bandar udara internasional di Yogyakarta dengan pendekatan arsitektur eco culture.
- Carpenter, L. Susan & Kennedy, W. J. D. (1988). *Managing Public Disputes: A Practical Guide to Handling Conflict and Reaching Agreements*. London: Jossey Bass Publisher
- Coser, Lewis. (1957). *Social Conflict and The Theory of Social Change*. In *Reading Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-modernity* (Donald McQuarrie, 1995, ed). New Jersey: Prentice Hall.
- Covey, S. R. (1992). *Principle centered leadership*. Simon and Schuster. Dema, Y. (2018). Komunikasi Mosaboa Lakiola dalam Penyelesaian Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dentana, Kecamatan Riuang, Kabupaten Ngada, Flores. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 6(2).
- Farida, A. (2013). Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 144-162.
- Fauzela, D. S., Sutiyoso, B. U., & Putra, S. (2019). Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) Sebagai Upaya Pengembangan Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 7(1), 87-87.
- Harrison, S. (1995). Four types of symbolic conflict. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 255-272.
- Hidayah, S. M. (2021). *Perancangan Terminal Penumpang Bandar Udara Atang Sanjaya Bogor dengan Pendekatan Arsitektur Hijau* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Indonesia).
- Kurniawan, J. S. (2017). Perwujudan/Implementasi Konsep Interaksi Aerotropolis Berbasis Tata Ruang di Indonesia. *Warta Ardha*, 42(4), 195-202.
- Nurdin, A. (2013). Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135-154.
- Nurhayati, Y. N., Kusumawati, D. K. K., & Yuliaty, E. Y. Y. (2020). Percepatan Implementasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia. *WARTA ARDHIA*, 46(1), 26-38.

- Prasisko, Y. G. (2018). Ludruk Jember: Ritual masyarakat perantauan. Parafrese: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan, 18(01).
- Purwadi, J. B. (2012). Analisis pengembangan bandar udara internasional soekarno hatta–jakarta. Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi, 5(11), 36-54.
- Rahayu, Y. E., & Cahyono, M. S. D. (2021). Analisis Perubahan Guna Lahan Terhadap Tingkat Hambatan Samping di Wilayah Pembangunan Bandara Dhoho Kediri. Jurnal Teknik Sipil UNPAL, 11(2), 80-85.
- Ramadhan, B. M. (2021). Perancangan Bandar Udara Dewadaru, Karimun Jawa dengan pendekatan arsitektur hijau. SKRIPSI-2021.
- Ramsbotham, O., T. Woodhouse, & H. Miall. (2005). Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management, and Transformation of Deadly Conflict. New York: Polity.
- Resmawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau. Universitas Hasanuddin.
- Shobirin, M., & Ali, H. (2019). Strategi Pengembangan Infrastruktur dalam Meningkatkan Pelayanan Penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 1(2), 155-168.
- Sirojuzilam. (2016). Identification of Faktors of Failures of Barisan Mountain Agropolitan Area Development in North Sumatera. International Journal of Economic Research, 13(2), 2163–2175
- Sopanudin, A. (2017). Konflik lahan pertanian dalam pembangunan bandara internasional di Kulon Progo. E-Societas, 6(1).
- Susan, N. (2009). Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Media Group Tampi,
- D. M. (2015). Tata Guna Lahan di Sekitar Kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi Manado. SPASIAL, 1(1), 27-34
- Tjahjono, T., & Yuliawati, E. (2017). Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Potensi Kertajati Sebagai Aerocity. Warta Ardhia, 43(1), 43-50. Todaro Michael, P., & Smith, S. C. (2008). Pembangunan Ekonomi Edisi 1. Jakarta: Erlangga.

Wibawa, B. A. (2015). Tata Guna Lahan Dan Transportasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Sumber, 7, 1.

Zulfikar, W., & Rukayat, Y.2017. Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandar Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Implementation Policy of Kertajati Airport Development in Majalengka Regency.